

**LAMPIRAN I.1**

**DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURABAYA**

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	SATUAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Jumlah Kab/Kota memiliki PERDA IMB dibagi jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam Provinsi		Kab/Kota memiliki PERDA IMB, sebanyak 38 PERDA Kab/Kota usia di atas 3 tahun dan Kepala Daerah terpilih 38 Kab/Kota	80 %	
		Peraturan ttg Kependudukan	2	Kab/kota memiliki perda tentang kependudukan	Jumlah Kab/Kota memiliki PERDA Kependudukan dibagi jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100%		Kab/Kota yang memiliki PERDA Kependudukan, sebanyak 38 Kab/Kota Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak 38 Kab/Kota		
		Aparat satpol PP	3	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil SATPOL PP pada akhir Tahun 2016 dibagi jumlah penduduk kali 50.000		Jumlah personil SATPOL PP pada Tahun 2017 : 155 Orang Jumlah Penduduk pada akhir Tahun 2017 : 38,052,950 jiwa		

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	SATUAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA	Penyampaian laporan kepada pemerintah	4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan		Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2017 disampaikan pada tanggal 28 Maret 2018 sesuai Surat Pengantar Nomor : 138/5337/011.1/2018, tanggal 26 Maret 2018.		
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	5	Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan		Bukti Pengiriman : Laporan Keuangan 2017, disampaikan pada tanggal 26 Maret 2018 sesuai Surat Pengantar Nomor : 900/ /213.4/2018, tanggal 26 Maret 2018. Laporan Kinerja 2016, disampaikan pada tanggal 25 Maret 2018 sesuai Surat Pengantar No		
		Implementasi SPM	6	Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Total Urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/Kota dibagi jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100%		1) Kab. Madiun = 6 Urusan 2) Kota Madiun = 6 Urusan 3) Kab. Ngawi = 6 Urusan 4) Kab. Magetan = 6 Urusan 5) Kab. Ponorogo = 6 Urusan 6) Kab. Pacitan = 6 Urusan	5	

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	SATUAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
							7) Kab. Trenggalek = 6 Urusan 8) Kab. Tulungagung = 6 Urusan 9) Kab. Blitar = 6 Urusan 10) Kota Blitar = 6 Urusan 11) Kab. Nganjuk = 6 Urusan 12) Kab. Bojonegoro = 6 Urusan 13) Kab. Tuban = 6 Urusan 14) Kab. Lamongan = 6 Urusan 15) Kab. Jombang = 6 Urusan 16) Kab. Mojokerto = 6 Urusan 17) Kota Mojokerto = 6 Urusan 18) Kab. Kediri = 6 Urusan 19) Kota Kediri = 6 Urusan 20) Kab. Malang = 6 Urusan 21) Kota Malang = 6 Urusan 22) Kota Batu = 6 Urusan 23) Kab. Pasuruan = 6 Urusan 24) Kota Pasuruan = 6 Urusan 25) Kab. Probolinggo = 6 Urusan		

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	SATUAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
							26) Kota Probolinggo = 6 Urusan 27) Kab. Lumajang = 6 Urusan 28) Kab. Jember = 6 Urusan 29) Kab. Situbondo = 6 Urusan 30) Kab. Bondowoso = 6 Urusan 31) Kab. Banyuwangi = 6 Urusan 32) Kab. Pamekasan = 6 Urusan 33) Kab. Bangkalan = 6 Urusan 34) Kab. Sampang = 6 Urusan 35) Kab. Sumenep = 6 Urusan 36) Kota Surabaya = 6 Urusan 37) Kab. Gresik = 6 Urusan 38) Kab. Sidoarjo = 6 Urusan ----- ----- Jumlah = 228 Urusan		

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	SATUAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Hubungan antar daerah	7	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU Pemprov. dengan daerah lain (yang masih berlaku Tahun 2017)		Jumlah MOU yang masih berlaku pada Tahun 2017 sebanyak 195 MOU yang terdiri dari : 1) Kerjasama dengan Luar Negeri : 9 MOU 2) Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi lain sebanyak : 11 MOU 3) Kerjasama dengan Kabupaten/ Kota sebanyak : 114 MOU 4) Kerjasama		
		Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	8	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah prioritas pembangunan nasional		Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD), sebanyak : 11 Program Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), sebanyak : 11 Program		
		Kewenangan	9	Rata-rata Urusan yang dilaksanakan pada seluruh Kab/Kota dibagi 26 (jumlah urusan wajib di PP 38/2007) x 100%	Total Urusan yang dilaksanakan seluruh Kab/Kota dibagi jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100%		1) Kab. Madiun = 22 Urusan 2) Kota Madiun = 22 Urusan 3) Kab. Ngawi = 22 Urusan 4) Kab. Magetan = 22 Urusan 5) Kab. Ponorogo = 22 Urusan 6) Kab. Pacitan = 22 Urusan 7) Kab. Trenggalek = 22		

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	SATUAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
							Urusan 8) Kab. Tulungagung = 22 Urusan 9) Kab. Blitar = 22 Urusan 10) Kota Blitar = 22 Urusan 11) Kab. Nganjuk = 22 Urusan 12) Kab. Bojonegoro = 22 Urusan 13) Kab. Tuban = 22 Urusan 14) Kab. Lamongan = 22 Urusan 15) Kab. Jombang = 22 Urusan 16) Kab. Mojokerto = 22 Urusan 17) Kota Mojokerto = 22 Urusan 18) Kab. Kediri = 22 Urusan 19) Kota Kediri = 22 Urusan 20) Kab. Malang = 22 Urusan 21) Kota Malang = 22 Urusan 22) Kota Batu = 22 Urusan 23) Kab. Pasuruan = 22 Urusan 24) Kota Pasuruan = 22 Urusan 25) Kab. Probolinggo =		

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	SATUAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
							22 Urusan 26) Kota Probolinggo = 22 Urusan 27) Kab. Lumajang = 22 Urusan 28) Kab. Jember = 22 Urusan 29) Kab. Situbondo = 22 Urusan 30) Kab. Bondowoso = 22 Urusan 31) Kab. Banyuwangi = 22 Urusan 32) Kab. Pamekasan = 22 Urusan 33) Kab. Bangkalan = 22 Urusan 34) Kab. Sampang = 22 Urusan 35) Kab. Sumenep = 22 Urusan 36) Kota Surabaya = 22 Urusan 37) Kab. Gresik = 22 Urusan 38) Kab. Sidoarjo = 22 Urusan ----- ----- Jumlah = 836 Urusan		

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	SATUAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Keuangan	10	Waktu penetapan perda APBD 2017	Tepat atau tidak tepat penetapan PERDA APBD 2017 (31 Desember 2017)		Apabila TEPAT : Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor 17 Tahun 2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017		
			11	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak ada PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP 58/2005		Apabila ADA : Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 2 Tahun 2007, tanggal 15 Maret 2007 tentang (Pengelolaan Keuangan Daerah)		
			12	belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk Pelayanan Dasar dibagi jumlah total belanja x 100%		Belanja Pelayanan Dasar APBD Tahun 2017 1) Urusan Pendidikan : Rp. 5,013,022,647,520.56 2) Urusan Kesehatan : Rp. 3,680,461,734,984.27 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang : Rp. 537,070,029,041.92 4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman :		



No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	SATUAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			13	belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk Kesehatan/Pendidikan dibagi jumlah total belanja x 100%		Belanja Pelayanan Dasar APBD Tahun 2016 1) Urusan Pendidikan : Rp. 5,013,022,647,521 2) Urusan Kesehatan : Rp. 3,680,461,734,984 ----- ----- Total Belanja Pend & Kes. Rp. 8,693,484,382,505 Total Be		
		Pelayanan publik	14	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak ada Standar Pelayanan Publik		Apabila ADA : Sebutkan dasar hukum, PERDA Nomor : 8 Tahun 2011 tentang (Standar Pelayanan Publik) 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Prov. Jatim No 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Prov. Jatim		
		Kepegawaian	15	Rasio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi dibagi jumlah Penduduk		Jumlah PNS Provinsi Tahun 2016 sebanyak : 19,763 orang Jumlah Penduduk Provinsi Tahun 2016 sebanyak : 38,363,195 jiwa		

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	SATUAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			16	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak ada database Kepegawaian		Apabila ADA : Sebutkan nama lengkap dari Sistem database (tentang Kepegawaian )		
		Kelembagaan	17	Penataan SKPD	Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007		Jumlah SKPD sbb: 1) Biro (Sekda) = 9 Unit 2) Dinas = 24 Unit 3) Badan = 14 Unit 4) Kantor = 1 Unit 5) Rumah Sakit = 14 Unit 6) Lembaga Teknis Lainnya = 5 Unit ----- Jumlah SKPD = 67 Unit		
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	18	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2017		PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2017 sebanyak : = 15 PERDA (Daftar PERDA terlampir)		
		Raperda yang diajukan tahun berjalan	19	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD Tahun 2017 dibagi jumlah RAPERDA yang diusulkan Tahun 2017		RAPERDA yang diusulkan Tahun 2017 sebanyak : 15 RAPERDA RAPERDA yang disetujui DPRD Tahun 2017 sebanyak : 15 RAPERDA		

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	SATUAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	20	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah Keputusan yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan dalam Tahun 2017 x 100%		Keputusan DPRD yang disampaikan kepada PEMDA dalam Tahun 2017 sebanyak : 45 Keputusan Keputusan yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam Tahun 2017 sebanyak : 45 Keputusan		
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAKLANJUTI PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjuti Keputusan Gubernur (KepGub)	21	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Keputusan Gubernur dalam Tahun 2017 x 100%		Keputusan Gubernur dalam Tahun 2017 sebanyak : 754 Keputusan Keputusan yang ditindaklanjuti, sebanyak : 754 Keputusan		
		Tindaklanjuti Peraturan Gubernur (PerGub)	22	Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Peraturan Gubernur dalam Tahun 2017 x 100%		Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti, sebanyak : 412 Pergub Peraturan Gubernur dalam Tahun 2017, sebanyak : 412 Pergub		
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Perda yang dibatalkan	23	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi jumlah PERDA yang dikirim ke Pemerintah untuk dievaluasi x 100%		PERDA yang dibatalkan, sebanyak : 0 PERDA PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah, sebanyak : 147 PERDA		

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	SATUAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Perda tentang konsultasi publik	24	Keberadaan PERDA/PerGub tentang konsultasi publik	Ada atau tidak ada Perda atau PerGub		Apabila ADA : Sebutkan dasar hukumnya. PERDA PERGUB Nomor 8 Tahun 2011, tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur		
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	25	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Provinsi, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur		Apabila ADA : Sebutkan nama media informasi dan Sebut kan dasar hukumnya Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang - <a href="http://jdih.jatimprov.go.id">http://jdih.jatimprov.go.id</a> - Leaflet / Brosur		
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK, DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	26	dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah Dana Perimbangan yang terserap dibagi jumlah Dana Perimbangan x 100%		Dana Perimbangan yang terserap Tahun 2017 sebesar : Rp. 12,494,048,645,633 Dana Perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2017, sebesar : Rp. 13,490,264,307,041		

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	SATUAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Alokasi belanja pada APBD dari DAU	27	Belanja Publik terhadap DAU	Total Belanja Langsung dibagi DAU x 100%		Belanja Langsung APBD Tahun 2017, sebesar : Rp. 9,474,359,113,002.35 DAU Tahun 2017, sebesar : Rp. 3,803,428,371,000		
		Alokasi belanja pada APBD	28	Belanja Langsung terhadap total APBD	Jumlah Belanja Langsung dibagi APBD x 100%		Belanja Langsung APBD Tahun 2017, sebesar : Rp. 9,474,359,113,002.35 Total Belanja APBD Tahun 2017, sebesar : Rp. 28,893,257,369,703.30		
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD x 100%		PAD APBD Tahun 2017, sebesar : Rp. 17,334,631,146,760.70 Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017 (Realisasi), sebesar : Rp. 29,887,311,525,946.40		
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Lapkeu	30	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap hasil LapKeu Daerah untuk 2 Tahun terakhir		Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini ... WTP Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini ... WTP		

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	SATUAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Besaran SILPA	31	SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%		SILPA Tahun 2017, sebesar : Rp. 2,771,670,596,721.69 Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017, sebesar : Rp. 29,887,311,525,946.40		
		Realisasi PAD	32	Rasio realisasi PAD thd anggaran pendapatan	Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD x 100%		Realisasi PAD Tahun 2017 : Rp. 17,334,631,146,760.70 Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017, sebesar : Rp. 29,887,311,525,946.40		
		Realisasi belanja	33	Realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total belanja APBD x 100%		Realisasi Belanja Tahun 2017, sebesar : Rp. 28,893,257,369,703.30 Total Belanja dalam APBD Tahun 2017, sebesar : Rp. 30,937,109,134,349.60		
		Pengawasan Inspektorat Provinsi	34	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir Tahun 2017		Temuan BPK RI sampai dengan akhir Tahun 2017 sebanyak : 605 Temuan Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2017, sebanyak : 662 Temuan		

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	SATUAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	35	Realisasi PAD 2017 terhadap potensi PAD	Jumlah PAD 2016 dibagi dengan potensi PAD x 100%		Realisasi PAD Tahun 2017, sebesar : Rp. 17,334,631,146,760.70 Potensi PAD pada APBD Tahun 2017, sebesar : Rp. 15,850,715,963,543.20		
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36	Peningkatan PAD	Kenaikan atau penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% atau (PAD 2017- PAD 2016) : PAD 2017 x 100%		Total PAD pada Tahun 2017 sebesar : Rp. 17,334,631,146,760.70 Total PAD pada Tahun 2016, sebesar : Rp. 15,817,795,024,797.00		
13	TEROBOSAN INOVASI BARU	Penghargaan	37	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017.	Jumlah penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2017		Penghargaan yang diterima sebanyak : 22 Penghargaan yang terdiri dari : 1. Penghargaan Pelaporan Keuangan Kategori Pemerintah Daerah 2. Penghargaan Program Sustainable Development's Goal (GDS) 3. Penghargaan Predikat Peringkat Pertama atas Capaian Kine		

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	SATUAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Pengadaan barang dan jasa	38	Keberadaan E-procurement	Ada atau tidak ada E-procurement		Apabila ADA : Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan Januari Tahun 2009 dengan sebutan <a href="http://jdih.jatimprov.go.id">hht.//jdih.jatimprov.go.id</a>		
		Daya saing daerah	39	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Realisasi ijin investasi dalam Tahun 2017		Pesertujuan ijin investasi pada Tahun 2017 sebanyak : 2165 ijin dengan total nilai investasi sebesar : Rp. 45.04 Trilyun		



